

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGGUNA PELAYANAN PENGADILAN

DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A-KHUSUS

TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER 2021)



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS IA KHUSUS

SEPTEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PERSIAPAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGGUNA PELAYANAN PENGADILAN

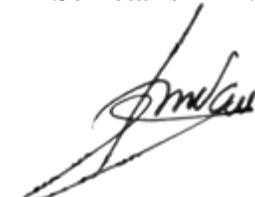
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS IA KHUSUS

TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER 2021)

 **TOP MANAGEMENT**

SOHE, SH., MH.
NIP. 19660128.199212.1.001

Sekretaris Tim Survei


LINDAWATI SERIKIT, SH., MH.
NIP. 19670904.198903.2.001

Ketua Tim Survei


HENDRA ADI PRAMONO, SH., MH.
NRP. 17600/P

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan terkait Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus.

Jakarta, 30 September 2021

ttd

TIM SURVEI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Metode.....	2
D. Tim Survey Persepsi Anti Korupsi.....	6
E. Jadwal Persepsi Anti Korupsi.....	7
F. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB II ANALISIS.....	9
A. Data Kuesioner.....	9
B. Target Capaian Survey.....	9
C. Hasil Pengolahan Data.....	10
a) Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	14
BAB III ANALISIS.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Saran	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Responden Berdasarkan Umur.....	3
Tabel 1.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.3	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1.4	Rencana Kerja Pelaksanaan.....	7
Tabel 2.1	Kategorisasi Nilai IPAK.....	13
Tabel 2.2	Nilai Rata-rata IPAK.....	13
Tabel 2.1.1	Indikator Manipulasi Peraturan.....	14
Tabel 2.2.1	Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	15
Tabel 2.3.1	Indikator Menjual Pengaruh.....	16
Tabel 2.4.1	Indikator Transaksi Biaya.....	17
Tabel 2.5.1	Indikator Biaya Tambahan.....	18
Tabel 2.6.1	Indikator Hadiah.....	19
Tabel 2.7.1	Indikator Transparansi Biaya.....	20
Tabel 2.8.1	Indikator Percaloan.....	21
Tabel 2.9.1	Indikator Perbuatan Curang.....	22
Tabel 2.10.1	Indikator Transaksi Rahasia.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Profil Responden Berdasarkan Umur.....	3
Grafik 1.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Grafik 1.3	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan.....	5
Grafik 2.1.1	Indikator Manipulasi Peraturan.....	14
Grafik 2.2.1	Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	15
Grafik 2.3.1	Indikator Menjual Pengaruh.....	16
Grafik 2.4.1	Indikator Transaksi Biaya.....	17
Grafik 2.5.1	Indikator Biaya Tambahan.....	18
Grafik 2.6.1	Indikator Hadiah.....	19
Grafik 2.7.1	Indikator Transparansi Biaya.....	20
Grafik 2.8.1	Indikator Percaloan.....	21
Grafik 2.9.1	Indikator Perbuatan Curang.....	22
Grafik 2.10.1	Indikator Transaksi Rahasia.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei

Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus.

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, antara lain: Swasta, Wiraswasta, Pengacara/Advokat, Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Dokter, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Kuesioner diberikan kepada pihak-pihak tersebut, namun karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka Tim Survei menyebarkan kuesioner tersebut hanya kepada pihak yang sering berhubungan dengan pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta pihak atau masyarakat yang berkunjung ke Pengadilan baik yang berurusan dengan pelayanan Pengadilan maupun sekedar berkunjung. Setelah kuesioner terkumpul oleh tim survei, ternyata yang layak dan pantas untuk dinilai yaitu jawaban dari 57 responden.

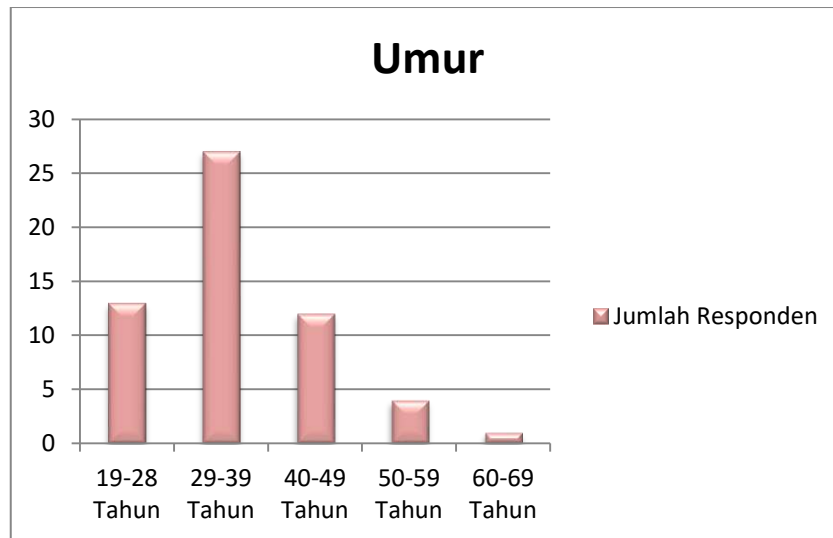
Berdasarkan survei yang telah dilakukan dapat diambil rata-rata responden yang mengisi lembar survei yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu :

- Berdasarkan Umur

Tabel 1.1
Profil Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	18 - 28 Tahun	13 Orang	22,81%
2	29 - 39 Tahun	27 Orang	47,37%
3	40 - 49 Tahun	12 Orang	21,05%
4	50 - 59 Tahun	4 Orang	7,02%
5	60 - 69 Tahun	1 Orang	1,75%
TOTAL		57 Orang	100,00%

Grafik 1.1
Profil Responden Berdasarkan Umur



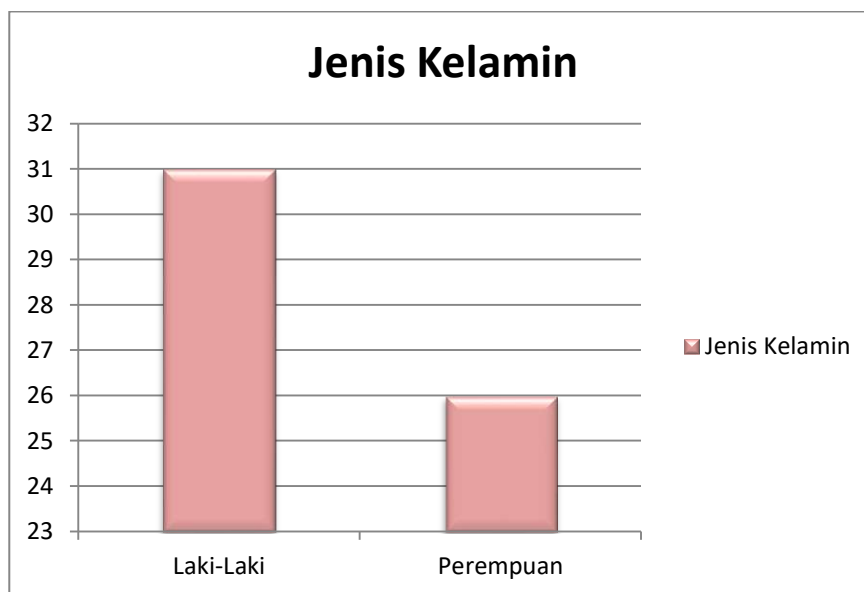
Berdasarkan tabel diatas mayoritas umur responden adalah 29 – 39 Tahun sekitar 47,37 %

- Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	31	54,38%
2	Perempuan	26	45,66%
TOTAL		57 Orang	100,00%

Grafik 1.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



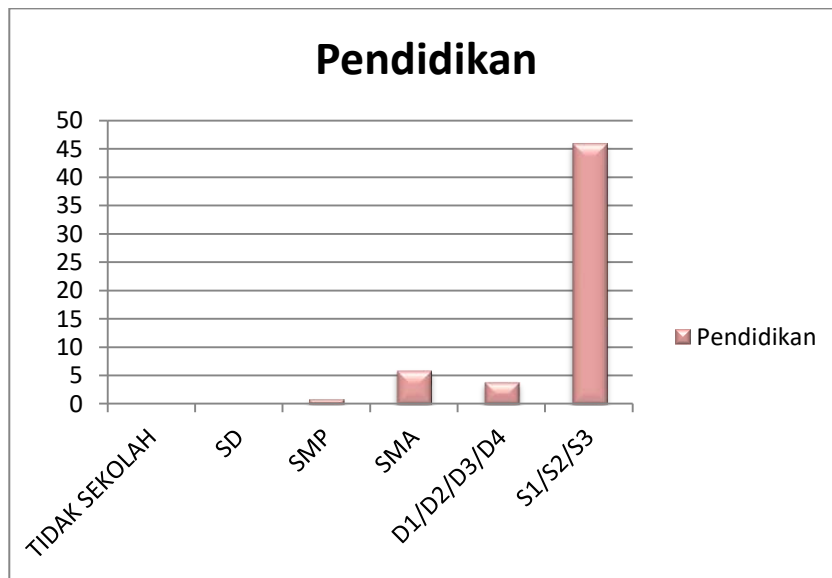
Berdasarkan tabel diatas mayoritas responden adalah Laki-laki sekitar 54,38 %

- Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%
3	SMP / SLTP	1	1,75%
4	SMA / SLTA	6	10,52%
5	D1/D2/D3/D4	4	7,01%
6	S1/S2/S3	46	80,70%
TOTAL		57 Orang	100,00%

Grafik 1.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan tabel diatas mayoritas pendidikan responden adalah S1/S2/S3 sekitar 80,70 %

D. Tim Survey Persepsi Anti Korupsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, berikut terlampir penyusunan tim Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara periode Juli – September 2021 :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sohe, S.H, M.H / 196601281992121001	Wakil Ketua	Pengarah (Manager Representatif)
2.	Hendra Adi Pramono, S.H, M.H	Hakim Ad Hoc Perikanan	Ketua
3.	Lindawati Serikit, S.H, M.H / 196709041989032001	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
4.	H. Syahmisar, S.H, M.H / 197605052000121004	Panitera Muda Khusus Perikanan	Anggota
5.	Yuyun Rusmulyanty, S.E, M.M / 197612182006042002	Kasub Bag Perencanaan IT dan Pelaporan	Anggota
6.	Ani Khairani Misraini, S.H, M.H / 198001252008052001	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Anggota
7.	Sunaji / 196705142012121003	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Anggota
8.	Rachmat Saputra, A.Md / 199209182020121004	Staf Kepaniteraan Muda Pidana	Anggota
9.	Kamaludin / 1986011272014081001	Staf Kepaniteraan Muda Pidana	Anggota
10.	Tuti Isnani	Honorar	Anggota
11.	Fayi Rana Raihan, S.Psi	Honorar	Anggota

E. Jadwal Survei Persepsi Anti Korupsi

Pengukuran/Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang mana Survei sebelumnya pada bulan Juni 2021 diperoleh hasil 90,11 sedangkan untuk survei berikutnya akan disajikan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi yang terpapar dalam laporan ini. Adapaun rencana kerja pada semester ini yaitu dari bulan Juli - September 2021.

Tabel 1.4
Rencana Kerja Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Persiapan	1 Juli 2021 – 7 Juli 2021
2	Pengumpulan Data SPAK	8 Juli 2021 – 30 September 2021
3	Pengolahan Data	30 September 2021
4	Penyusunan dan Pelaporan	30 September 2021
5	Tindak Lanjut Terhadap Hasil SPAK	1 Oktober 2021
6	Monev dan Evaluasi Terhadap Hasil SPAK	2 Oktober 2021

F. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei mengarahkan para pengguna layanan untuk mengisi survei secara online, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi.
3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.

4. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.
5. Tim Survei melaporkan ke Manager Resperentatif, lalu data disimpan di Document Control

BAB II

ANALISIS

A. Data Kuesioner

Metode pengolahan data sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparasi Biaya
5. Transaksi Rahasia
6. Biaya Tambahan
7. Hadiah
8. Transparansi Pembayaran
9. Percaloan
10. Perbuatan Curang

B. Target Capaian Survei

Dalam survei pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, seluruh unsur pengadilan beserta staf dan karyawan menargetkan hasil yang maksimal yaitu dengan Kategori A atau kriteria Sangat Bersih Dari Korupsi atau bila dikonversikan dengan angka yaitu $> 81,25 - 100$.

13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
18	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
22	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
23	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3		
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
34	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4		
35	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4		
36	4	4	4	1	1	4	1	4	4	4		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
40	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4		
41	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
42	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4		
43	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
46	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		

47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
49	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
50	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4		
51	4	4	3	3	4	4	3	4	4	2		
52	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
54	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
56	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4		
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	222	228	222	214	216	226	210	225	225	224		
N.Rata-rata	3,89	4,00	3,89	3,75	3,78	3,96	3,68	3,94	3,94	3,93		
												1
NRR Tertimbang	0,38	0,40	0,38	0,37	0,37	0,39	0,36	0,39	0,39	0,39	3,88	10
												0,10

Jumlah Responden

NILAI INDEKS

Total Nilai Persepsi Per Kuesioner/

Total Unsur Yang Terisi

Bobot

Unsur Pertanyaan

Bobot NRR Tertimbang

Keterangan :

Q1 - Q9 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

SPAK : Survei Persepsi Anti Korupsi

*) : Jumlah NRR SPAK Tertimbang

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

SPAK = 3,88

Tabel 2.1
Kategorisasi Nilai SPAK

Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak Bersih Dari Korupsi
1,76-2,50	43,76-62,50	2	Kurang Bersih Dari Korupsi
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Bersih Dari Korupsi
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Sangat Bersih Dari Korupsi

Tabel 2.2
Nilai Rata-rata

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Peringkat
Q 1	Manipulasi Peraturan	3.89	6
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	1
Q 3	Menjual Pengaruh	3.89	7
Q 4	Transaksi Biaya	3.75	9
Q 5	Biaya Tambahan	3.78	8
Q 6	Hadiah	3.96	2
Q 7	Transparansi Biaya	3.68	10
Q 8	Percaloan	3.94	3
Q 9	Perbuatan Curang	3.94	4
Q10	Transaksi Rahasia	3.93	5
		3.88	

a) Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

- Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,89. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 2.1.1
Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	0	0%
2.	Jarang	0	0%
3.	Sering	6	10,52%
4.	Selalu	51	89,48%

Grafik 2.1.1
Indikator Manipulasi Peraturan



- Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 2.2.1
Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	0	0%
2.	Jarang	0	0%
3.	Sering	0	0%
4.	Selalu	57	100%

Grafik 2.2.1
Indikator Penyalahgunaan Jabatan



- Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,89. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari tindakan menjual pengaruh.

Tabel 2.3.1
Indikator Menjual Pengaruh

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	0	0%
2.	Jarang	2	3,50%
3.	Sering	2	3,50%
4.	Selalu	53	93,00%

Grafik 2.3.1
Indikator Menjual Pengaruh



- Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,75. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat mudah dalam mendapatkan informasi biaya.

Tabel 2.4.1
Indikator Transaksi Biaya

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	1	1,75%
2.	Jarang	1	1,75%
3.	Sering	9	15,78%
4.	Selalu	46	80,70%

Grafik 2.4.1
Indikator Transaksi Biaya



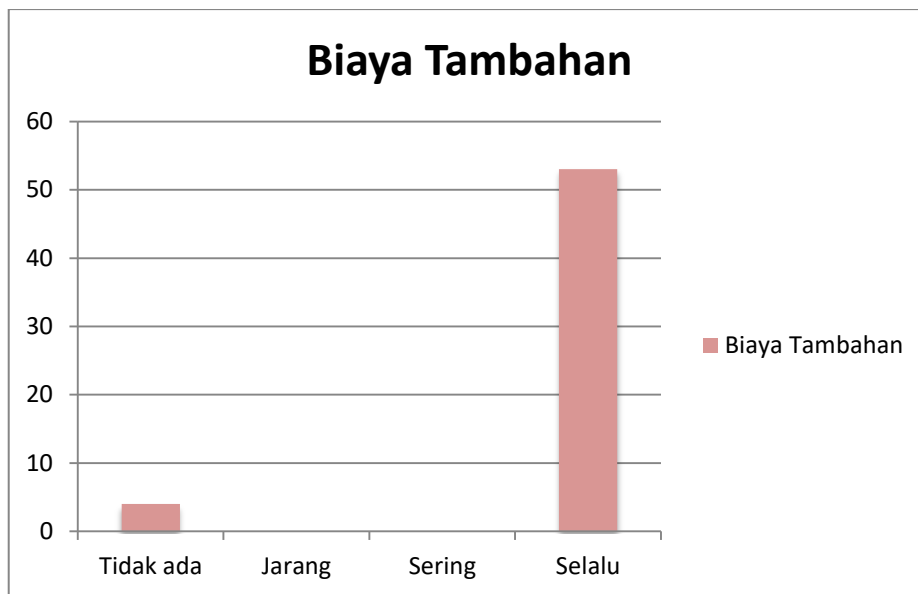
- Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,78. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 2.5.1
Indikator Biaya Tambahan

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	4	7,02%
2.	Jarang	0	0%
3.	Sering	0	0%
4.	Selalu	53	92,98%

Grafik 2.5.1
Indikator Biaya Tambahan



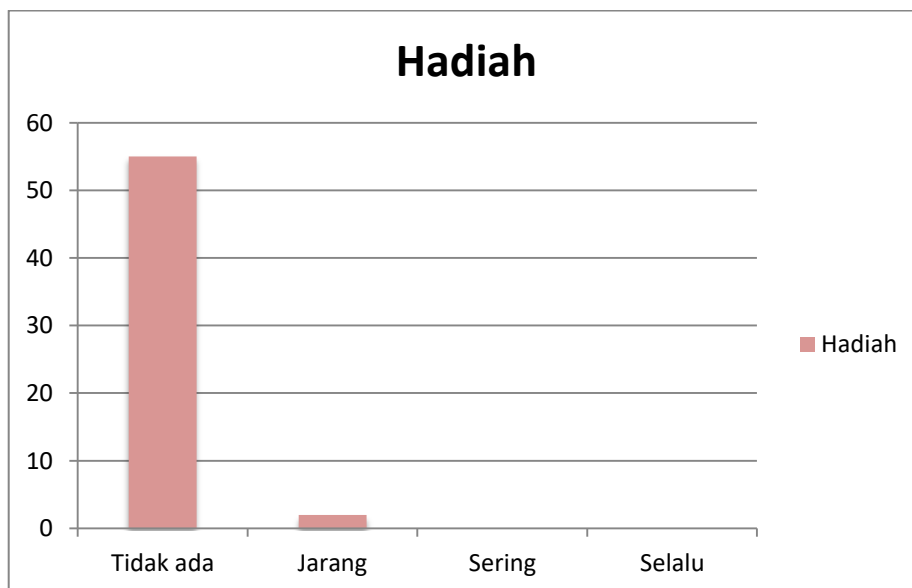
- Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari pemberian hadiah.

Tabel 2.6.1
Indikator Hadiah

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	55	96,49%
2.	Jarang	2	3,51%
3.	Sering	0	0%
4.	Selalu	0	0%

Grafik 2.6.1
Indikator Hadiah



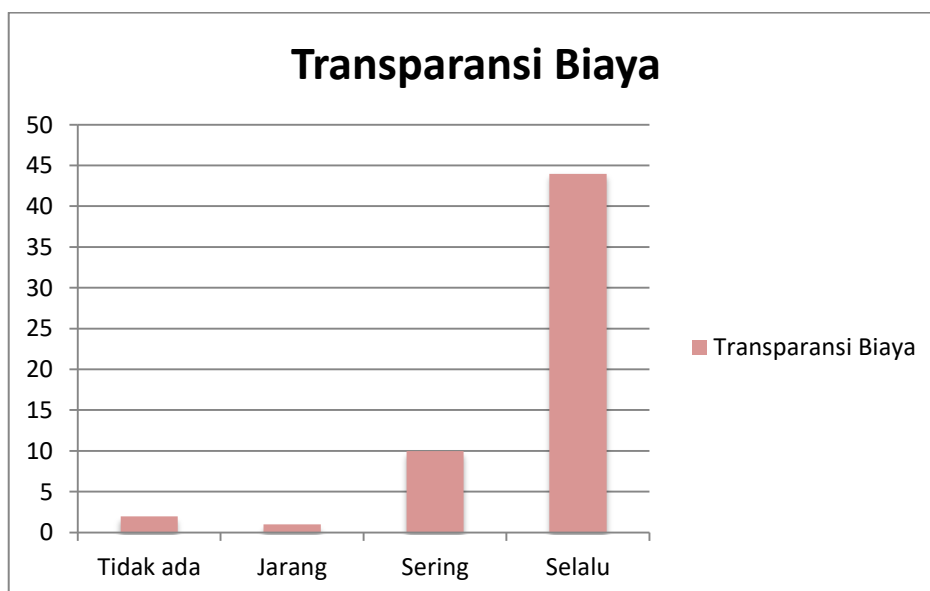
- Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,68. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat transparan dalam biaya.

Tabel 2.7.1
Indikator Transparansi Biaya

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	2	3,50%
2.	Jarang	1	1,75%
3.	Sering	10	17,54%
4.	Selalu	44	77,19%

Grafik 2.7.1
Indikator Transparansi Biaya



- Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 2.8.1
Indikator Percaloan

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	54	94,73%
2.	Jarang	3	5,27%
3.	Sering	0	0%
4.	Selalu	0	0%

Grafik 2.8.1
Indikator Percaloan



- Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari perbuatan curang.

Tabel 2.9.1
Indikator Perbuatan Curang

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	55	96,50%
2.	Jarang	2	3,50%
3.	Sering	0	0%
4.	Selalu	0	0%

Grafik 2.9.1
Indikator Perbuatan Curang



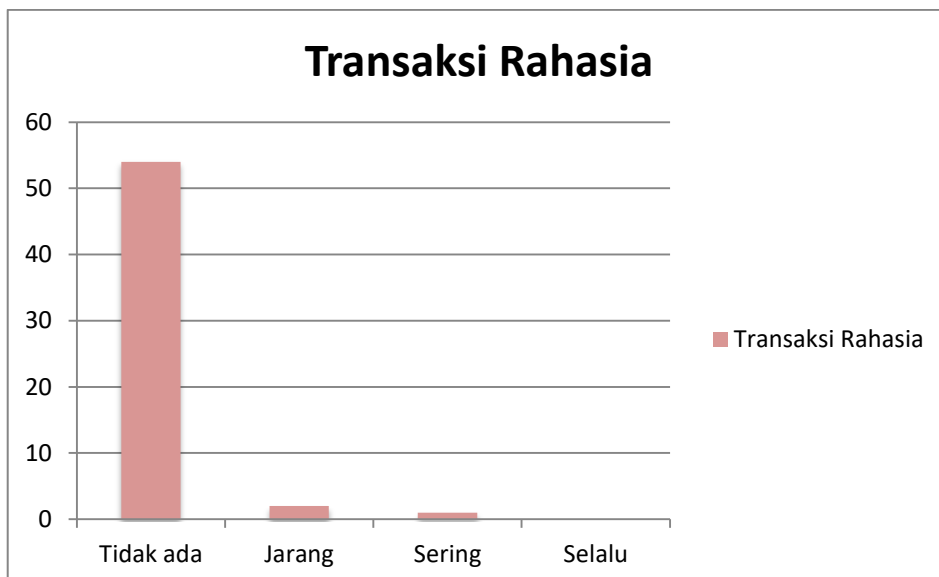
- Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat bersih dari transaksi rahasia.

Tabel 2.10.1
Indikator Transaksi Rahasia

No.	Indeks persepsi	Frekuensi	%
1.	Tidak ada	54	94,73%
2.	Jarang	2	3,50%
3.	Sering	1	1,75%
4.	Selalu	0	0%

Grafik 2.10.1
Indikator Transaksi Rahasia



Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat indikator nilai tertinggi adalah dari lingkup “*Penyalahgunaan Jabatan*”, dengan total nilai indeks rata-rata **4,00** dengan kategori **SANGAT BERSIH DARI KORUPSI**, sedangkan untuk yang terendah adalah lingkup “*Transparansi Biaya*” dimana indeks rata-rata nya adalah **3,68** dengan kategori **SANGAT BERSIH DARI KORUPSI**. Faktor yang menyebabkan indikator “*Penyalahgunaan Jabatan*” menjadi indikator dengan nilai tertinggi adalah karena tidak ada karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menawarkan para pengguna layanan untuk mengurus sesuatu, semuanya dilakukan sesuai prosedur dan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sedangkan faktor yang menyebabkan indikator “*Transparansi Biaya*” menjadi indikator dengan nilai terendah adalah masih kurangnya penjelasan mengenai biaya-biaya yang harus dibayarkan maupun biaya-biaya yang dikeluarkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar **97,02** dan berada pada kategori **SANGAT BERSIH DARI KORUPSI**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
2. Penyalahgunaan Jabatan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
3. Menjual Pengaruh berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
4. Transaksi Rahasia berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
5. Biaya Tambahan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
6. Hadiah berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
7. Transparansi Biaya berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
8. Percaloan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
9. Perbuatan Curang berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
10. Transaksi Rahasia berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
11. Unsur **Transparansi Biaya** sudah menunjukkan hasil Sangat Bersih Dari Korupsi, namun nilainya terendah dibandingkan unsur-unsur yang lainnya, dimana pencapaiannya berada pada nilai interval **3,40**.
12. Adapun 3 indikator terendah dalam Survei ini yaitu **Transparansi Biaya, Transaksi Biaya dan Biaya Tambahan**.
13. Adapun 3 indikator tertinggi dalam Survei ini yaitu **Menjual Pengaruh, Hadiah dan Percaloan**.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diberikan oleh beberapa responden yang bila disimpulkan yaitu :

1. Agar penjelasan terhadap biaya-biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan dapat dijelaskan dengan jelas dan transparan.

2. Agar seluruh jenis biaya-biaya dipasang dipapan sehingga para pengguna layanan tidak harus menanyakan kepada para petugas.
3. Agar informasi mengenai biaya apapun diberikan bukti bayar.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS I A KHUSUS

Berkantor sementara di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat

(eks. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Website : www.pn-jakartautara.go.id

JADWAL KEGIATAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III

NO	KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Persiapan	1 Juli 2021 – 7 Juli 2021	
2.	Pengumpulan Data / Survei SPAK	8 Juli 2021 – 30 September 2021	
3.	Pengolahan Data	30 September 2021	
4.	Pembuatan Laporan	30 September 2021	
5.	Tindak Lanjut Terhadap Hasil SPAK	1 Oktober 2021	
6.	Monev dan Evaluasi Terhadap Hasil SPAK	2 Oktober 2021	

Jakarta, 30 September 2021

Panitera Muda Hukum



Lindawati Serikit, SH, MH

